

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- G.H.S.Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya.
- _____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Hastanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- J.C.S. Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jujun S. Suriasumantri, 1987, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Prenadamedia Group, Jakarta.
- R. Soebekti, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Cetakan ke XXV*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- S. Nasution, 2006, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.

- S. Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sujamto, 1989, *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Surarsumi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Tineka Cipta, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Tesis dan Jurnal

- Indah Fitrieningrum, “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Notaris di Kedu Utara”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Muhammad Yuswan, “Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Konawe Selatan”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Rezty Dhany Yustitiyani, “Pengawasan dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan di Kabupaten Jayawijaya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.
- Tri Meitasari Bakhtiar, “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Indramayu”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.
- Edison, Dahlan, Ilyas Ismail, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Banda Aceh”, *Jurnal*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2014.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pelaksanaan Pengawasan Notaris di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (Studi Analisis Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao

HARDNAS LAIMUS M M, Dr.Destri Budi Nugraheni,S.H.,M.Si.

Irma Widiyanti, *“Majelis Pengawas dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur”*, *Jurnal, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2019.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2767.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184.

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009/014 Tahun 2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris

D. Artikel dan Majalah



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pelaksanaan Pengawasan Notaris di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (Studi Analisis Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao

HARDNAS LAIMUS M M, Dr.Destri Budi Nugraheni,S.H.,M.Si.

N.G.Pudana, 2006, Notaris dan Permasalahannya: Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sidtem Hukum Indonesia), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III.

E. Internet

http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST

<https://kbbi.web.id/preventif>

<https://saburaijuakab.go.id/halaman/topografi>

<Ntt.Kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3842>

<Opd.saburaijuakab.go.id/opd>

<Rotendaokab.go.id>